



**KOMISI INFORMASI DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Gedung Diskominfo DIY Lantai 2, Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152  
Telepon/Fax : (0274) 374289, E-mail: [kip-diy@jogjaprovo.go.id](mailto:kip-diy@jogjaprovo.go.id), Website: [komisi-informasi.jogjaprovo.go.id](http://komisi-informasi.jogjaprovo.go.id)

---

**MONITORING DAN EVALUASI  
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK NEGARA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2017**

**1. Pendahuluan**

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, membawa konsekuensi perubahan paradigma ke arah keterbukaan. Bagi lembaga yang berkait dengan penyelenggaraan negara, penyelenggara negara maupun lembaga/organisasi yang mengelola bantuan luar negeri maupun dana masyarakat, harus memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, juga mengamanatkan kepada Komisi Informasi untuk menjalankan Undang-undang ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23: *"Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaan, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi"*.

Pada Pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Monitoring dan Evaluasi kepada badan publik dilakukan satu kali dalam setahun dan disampaikan ke badan publik kemudian diumumkan ke publik.

**2. Dasar Kegiatan, Maksud dan Tujuan**

Kegiatan monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Badan Publik di DIY didasarkan pada Pasal 23 UU 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk melaksanakan evaluasi layanan informasi publik di Badan Publik.

Adapun maksud dilaksanakannya evaluasi adalah untuk mengetahui terpenuhinya hak publik dalam mendapatkan layanan informasi publik yang dilakukan Badan Publik. Sedangkan tujuan dari evaluasi ini untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Badan Publik dalam melaksanakan kewajibannya memberikan informasi Publik kepada setiap warga negara.

### 3. Proses dan Mekanisme

Tahun ini adalah Tahun ketiga Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan metode yang telah dikembangkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih terukur dalam konteks wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BP2KI) Yogyakarta. Sejak dari penyusunan instrumen penilaian, penyusunan daftar kuesioner hingga penentuan pemenang.

Tim Monev menyepakati beberapa ketentuan pokok antara lain bahwa kategori yang dimonev terdiri dari :

- a. Badan Publik Pemerintah Daerah DIY
- b. Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Badan Publik Kecamatan
- d. Badan Publik Vertikal yang ada di DIY
- e. Badan Publik Yudikatif
- f. BUMD milik Pemerintah Daerah (DIY maupun Kabupaten/Kota)
- g. Partai Politik
- h. Badan Publik Legislatif
- i. PPID Utama Pemerintah Daerah.

Kriteria untuk Partai Politik disepakati, minimal 75 persen harus mengembalikan kuesioner, Legislatif dan PPID Utama Pemerintah Daerah harus seluruhnya mengembalikan kuesioner sesuai waktu yang kami tentukan. Tim juga menyepakati bahwa bobot nilai kuesioner sebesar 20 persen, website 50 persen serta visitasi 30 persen. Besarnya bobot nilai *website* karena informasi yang diunggah melalui mekanisme yang bertahap, serta dapat diakses dari seluruh dunia. Untuk mendapatkan hasil yang presisi sesuai dengan realitas implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik, Komisi Informasi melakukan 3 (Tiga) tahapan penilaian:

Sebelum dilakukan evaluasi, Komisi Informasi terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada Badan Publik pada tanggal 19 April 2017 bertempat di Aula

Diskominfo DIY.

**Tahap Pertama** memiliki bobot 20%, Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questioner*) ke seluruh Badan Publik. Yakni penilaian yang dilakukan secara mandiri oleh Badan Publik dengan mengisi kuesioner yang dikirimkan oleh KID DIY, Selanjutnya seluruh badan publik yang mengembalikan kuesioner tersebut kemudian dinilai oleh Tim Monev.

**Tahap Kedua** memiliki bobot 50%, Verifikasi *Website* atau pencermatan *Website* oleh Tim Monev berdasarkan badan publik yang mengembalikan kuesioner penilaian Mandiri (*Self Assessment Questioner*)

**Tahap Ketiga** memiliki bobot 30%, Visitasi ke sejumlah Badan Publik yang masuk dalam nominasi berdasarkan penilaian tahap pertama dan tahap kedua. Visitasi dilakukan dengan wawancara dan pembuktian secara langsung dokumen-dokumen atau informasi dalam berbagai format/kemasan berdasarkan keterangan tertulis dalam SAQ dan dikonversikan dengan nilai sesuai pandangan Tim Monitoring dan Evaluasi badan publik Tahun 2017.

Dari tahapan pertama dan kedua maka dapat diketahui jumlah nilai yang diperoleh. Dari Badan Publik yang memperoleh nilai tinggi, kami ambil sebanyak 2 x dari pemenang di masing-masing kategori, untuk dilakukan visitasi. Tahapan visitasi ini untuk melihat dan mencocokkan dokumen yang telah disebutkan (dalam keusioner) maupun yang sudah diunggah di website. Dengan melihat dan mencocokkan dokumen, maka dapat diketahui bahwa dokumen (*hard copy*) dapat dipergunakan untuk melayani informasi public kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang belum akrab dengan teknologi informasi.

Ketiga tahapan penilaian tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mencermati sejauh mana informasi publik dikuasai badan publik berdasarkan Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Informasi tersebut yakni informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi serta merta, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Hal ini penting agar badan publik memiliki pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam mengelola informasi publik.

#### 4. Data Pengembalian Kuesioner

Dari sebanyak 388 kuesioner yang dikirimkan sebanyak 245 Badan Publik yang mengisi dan mengembalikan. Hanya Badan Publik yang mengembalikan kuesioner yang dapat mengikuti penilaian berikutnya, serta jumlahnya sesuai dengan kuota sesuai kategori yang kami tentukan di atas. Rinciannya sebagai berikut:

**DATA PENGEMBALIAN KUESIONER (SAQ)  
MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2017**

No	Kategori		Jumlah Pengiriman dan Pengembalian		Total Pengiriman dan Pengembalian	
			Pengiriman	Pengembalian	Pengiriman	Pengembalian
1	PPID Utama Pemda Se-DIY	PPID Utama Pemda Se-DIY	6	5	6	5 *) 1 terlambat
2	Badan Publik Pemerintah Kab/Kota Se-DIY	Badan Publik Pemerintah Kab/Kota Se-DIY	38	27	38	27
3	Badan Publik Pemerintah Kab. Sleman	Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY	31	31	167	115
4	Badan Publik Pemerintah Kab. Bantul		37	28		
5	Badan Publik Pemerintah Kab.Kulon Progo		30	22		
6	Badan Publik Pemerintah Kab.Gunungkidul		32	0		
7	Badan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta		37	34		
8	Kecamatan Kota Yogyakarta		Kecamatan Se-DIY	14		
9	Kecamatan Kab. Sleman	17	17			
10	Kecamatan Kab. Bantul	17	15			
11	Kecamatan Kab. KulonProgo	12	7			
12	Kecamatan Kab. Gunungkidul	18	1			
13	Yudikatif	Yudikatif	18	11	18	11
14	Vertikal	Vertikal	47	22	47	22
15	BUMD	BUMD	18	8	18	8

16	Partai Politik	Partai Politik	10	3	10	3
17	DPRD Se-DIY	DPRD Se-DIY	6	0	6	0
<b>TOTAL</b>					<b>388</b>	<b>245</b>

Penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questioner*) oleh KID DIY sebanyak 388 (tiga ratus delapan puluh delapan), sedang badan publik yang mengembalikan berjumlah 245 (dua ratus empat puluh lima) atau sekitar 63.14%.

## 5. Hasil Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik

Setelah melalui proses dan tahapan penilaian kesatu, kedua, dan ketiga. Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Negara di wilayah DIY tahun 2017, kemudian menetapkan :

- a. Tim Monitoring dan Evaluasi memberikan **Apresiasi** kepada PPID Utama Pemda DI Yogyakarta yang telah berupaya mengimplementasikan Keterbukaan Informasi kepada Badan Publik yang berada di bawah koordinasinya, juga mempermudah akses informasi publik pada masyarakat luas.
- b. Untuk kategori PPID Utama hanya diberikan **Apresiasi**, dengan alasan dikarenakan tidak semua PPID Utama mengembalikan Self Assessment Questionare (SAQ). Sedangkan untuk kategori Badan Publik **Parpol** tidak dilanjutkan karena yang mengembalikan hanya 3 Parpol dari 10 Parpol yang memperoleh kursi di DPRD DIY. Sedangkan untuk kategori Legislatif juga tidak dilanjutkan karena tidak ada yang mengembalikan, sehingga tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan Ketentuan Umum dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta.
- c. Peringkat terbaik berdasarkan kategori OPD Pemerintah Daerah DIY, OPD Pemda Kabupaten/Kota, Kecamatan, Instansi Vertikal, dan Yudikatif, BUMD dan Apresiasi kepada PPID Utama, yaitu sebagai berikut:

HASIL PEMERINGKATAN  
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK  
TAHUN 2017  
**KATEGORI: PPID UTAMA PEMERINTAH DAERAH SE-DIY**

NO	Nama Badan Publik	Variabel			Total Nilai	Peringkat
		SAQ	Website	Visitasi		
		20%	50%	30%		
1	PPID Utama Pemda/Provinsi DIY	7.40	17.70	24.60	49.70	Apresiasi
5	PPID Utama Kota Yogyakarta	15.95	0.20	25.50	41.65	
2	PPID Utama Kabupaten Sleman	10.28	2.70	0.00	12.98	
3	PPID Utama Kabupaten Kulon Progo	11.61	0.90	0.00	12.51	
4	PPID Utama Kabupaten Bantul	6.32	2.90	0.00	9.22	
6	PPID Utama Kabupaten Gunungkidul	-	-	-	-	

Keterangan :

\*SAQ : *Self Assesment Questionnaire (Penilaian Mandiri)*

\*Website: *Verifikasi Website*

\*(-) : *Website tidak dinilai dan tidak di visitasi karena tidak memenuhi kriteria dan peringkat dalam kategori yang sudah ditetapkan Tim Monev pada tahap pertama (SAQ).*

HASIL PEMERINGKATAN  
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK  
TAHUN 2017  
**KATEGORI: BADAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH DIY**

NO	Nama Badan Publik	Variabel			Total Nilai	Peringkat
		SAQ	Website	Visitasi		
		20%	50%	30%		
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemda DIY	7.25	42.30	29.70	79.25	Terbaik 1
2	Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemda DIY	10.10	42.25	14.70	67.05	Terbaik 2

3	Badan Kepegawaian Daerah Pemda DIY	8.22	31.80	19.80	59.82	Terbaik 3
4	Badan Ketahanan Pangan dan penyuluhan Pemda DIY	6.16	29.25	21.30	56.71	
5	Dinas Pertanian Pemda DIY	7.76	30.80	13.80	52.36	
6	Bappeda Pemda DIY	12.99	20.95	10.80	44.74	
7	DPPKA Pemda DIY	17.99	8.05	0.00	26.04	
8	Badan Lingkungan Hidup Pemda DIY	6.09	19.60	0.00	25.69	
9	Dinas Perhubungan Pemda DIY	9.86	15.80	0.00	25.66	
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Pemda DIY	11.63	10.45	0.00	22.08	
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemda DIY	6.04	14.75	0.00	20.79	
12	Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pemda DIY	9.92	9.30	0.00	19.22	
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemda DIY	18.87	0.00	0.00	18.87	
14	Dinas Kesehatan Pemda DIY	13.09	4.20	0.00	17.29	
15	Dinas PU, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Pemda DIY	5.41	11.30	0.00	16.71	
16	Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Setda Pemda DIY	5.37	8.55	0.00	13.92	
17	Sekretariat DPRD DIY	10.48	3.30	0.00	13.78	
18	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY	9.15	0.60	0.00	9.75	
19	Dinas Sosial Pemda DIY	7.86	1.60	0.00	9.46	

20	RS GRASIA Pemda DIY	8.09	0.00	0.00	8.09	
21	Inspektorat Pemda DIY	4.61	2.90	0.00	7.51	
22	Rumah Sakit Paru Respira DIY	4.99	1.70	0.00	6.69	
23	Bagian penelitian dan Pengembangan pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Pemda DIY	6.23	0.00	0.00	6.23	
24	Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda DIY	4.24	1.50	0.00	5.74	
25	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemda DIY	5.11	0.00	0.00	5.11	
26	bagian Administrasi pada Biro Umum dan Protokol Setda Pemda DIY	3.72	1.00	0.00	4.72	
27	Bagian Bina Kapasitas pada Biro Administrasi dan Sumber Daya Alam Setda	3.98	0.40	0.00	4.38	

Keterangan :

\*SAQ : *Self Assesment Questionnaire (Penilaian Mandiri)*

\*Website: *Verifikasi Website*

\*(-) : *Website tidak dinilai dan tidak di visitasi karena tidak memenuhi kriteria dan peringkat dalam kategori yang sudah ditetapkan Tim Monev pada tahap pertama (SAQ).*

**HASIL PEMERINGKATAN  
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK  
TAHUN 2017**

**KATEGORI: BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

NO	Nama Badan Publik	Kabupaten / Kota	Variabel			Total Nilai	Peringkat
			SAQ	Website	Visitasi		
			20%	50%	30%		
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman	SLEMAN	12.32	49.80	29.10	91.22	Terbaik 1
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sleman	SLEMAN	13.47	40.80	28.80	83.07	Terbaik 2



3	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sleman	SLEMAN	10.74	39.80	30.00	80.54	Terbaik 3
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	7.58	37.15	20.70	65.43	Terbaik 4
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	14.98	26.00	21.60	62.58	Terbaik 5
6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	10.91	33.00	10.50	54.41	
7	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan Kab. Bantul	BANTUL	5.54	28.25	19.80	53.59	
8	Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	12.89	23.30	12.60	48.79	
9	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul	BANTUL	8.75	21.10	14.10	43.95	
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Bantul	BANTUL	9.06	21.00	9.30	39.36	
11	Dinas Pariwisata Kab. Sleman	SLEMAN	15.89	12.75	0.00	28.64	
12	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Bantul	BANTUL	4.54	23.50	0.00	28.04	
13	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul	BANTUL	8.26	17.20	0.00	25.46	
14	Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	12.27	13.00	0.00	25.27	
15	Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	9.86	12.70	0.00	22.56	
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sleman	SLEMAN	10.96	11.50	0.00	22.46	
17	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL	BANTUL	6.06	15.65	0.00	21.71	
18	BAPPEDA KAB SLEMAN	SLEMAN	14.39	6.55	0.00	20.94	

19	Badan Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	6.31	13.30	0.00	19.61	
20	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	5.76	13.25	0.00	19.01	
21	Dinas Kebudayaan Kab. Sleman	SLEMAN	14.55	4.30	0.00	18.85	
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Bantul	BANTUL	7.49	11.25	0.00	18.74	
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	4.59	13.75	0.00	18.34	
24	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	9.98	7.75	0.00	17.73	
25	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul	BANTUL	6.18	11.20	0.00	17.38	
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kab. Sleman	SLEMAN	10.68	6.55	0.00	17.23	
27	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	10.41	6.80	0.00	17.21	
28	Dinas Pendidikan Kab. Sleman	SLEMAN	14.17	2.50	0.00	16.67	
29	Dinas Pertanahan dan tata Ruang Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	13.45	3.10	0.00	16.55	
30	Sekretariat DPRD Kab. Sleman	SLEMAN	9.16	7.30	0.00	16.46	
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman	SLEMAN	10.75	5.60	0.00	16.35	
32	Dinas Kesehatan Kab. Bantul	BANTUL	10.67	5.50	0.00	16.17	
33	KESBANGPOL KULON PROGO	KULON PROGO	5.42	10.50	0.00	15.92	
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	9.09	6.10	0.00	15.19	

35	RSUD Prambanan	SLEMAN	9.88	5.30	0.00	15.18	
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sleman	SLEMAN	13.34	1.80	0.00	15.14	
37	Dinas Pariwisata Kab. Bantul	BANTUL	4.93	10.20	0.00	15.13	
38	RSUD KOTA YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	9.58	5.20	0.00	14.78	
39	Dinas Pertanahan dan tata Ruang Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	10.25	4.25	0.00	14.50	
40	RSUD SLEMAN	SLEMAN	13.68	0.80	0.00	14.48	
41	Dinas Tenaga Kerja Kab. Sleman	SLEMAN	14.37	0.00	0.00	14.37	
42	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sleman	SLEMAN	5.33	8.70	0.00	14.03	
43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sleman	SLEMAN	9.26	4.70	0.00	13.96	
44	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	10.11	3.50	0.00	13.61	
45	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	6.28	7.30	0.00	13.58	
46	Dinas Perhubungan Kab. Sleman	SLEMAN	8.50	4.65	0.00	13.15	
47	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	7.76	5.25	0.00	13.01	
48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	3.50	9.50	0.00	13.00	
49	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sleman	SLEMAN	8.17	4.75	0.00	12.92	

50	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul	BANTUL	7.57	5.20	0.00	12.77	
51	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul	BANTUL	6.15	6.00	0.00	12.15	
52	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sleman	SLEMAN	7.31	4.70	0.00	12.01	
53	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman	SLEMAN	9.34	2.00	0.00	11.34	
54	Sekretariat DPRD Kab. Bantul	BANTUL	7.21	4.10	0.00	11.31	
55	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman	SLEMAN	4.84	6.35	0.00	11.19	
56	Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	5.12	6.00	0.00	11.12	
57	Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	4.44	6.45	0.00	10.89	
58	Inspektorat Kab. Sleman	SLEMAN	7.77	3.00	0.00	10.77	
59	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	10.27	0.00	0.00	10.27	
60	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sleman	SLEMAN	7.94	2.30	0.00	10.24	
61	Dinas Perhubungan Kab. Bantul	BANTUL	6.42	3.80	0.00	10.22	
62	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	9.99	0.00	0.00	9.99	
63	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	8.70	1.20	0.00	9.90	
64	Inspektorat Daerah Kab. Bantul	BANTUL	6.76	3.10	0.00	9.86	

65	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	BANTUL	8.62	1.20	0.00	9.82	
66	Dinas Sosial Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	9.63	0.00	0.00	9.63	
67	Satpol PP Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	9.61	0.00	0.00	9.61	
68	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	7.78	1.75	0.00	9.53	
69	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	6.49	3.00	0.00	9.49	
70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	8.58	0.90	0.00	9.48	
71	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kab. Sleman	SLEMAN	7.90	1.20	0.00	9.10	
72	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul	BANTUL	5.28	3.80	0.00	9.08	
73	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Sleman	SLEMAN	8.11	0.70	0.00	8.81	
74	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	8.78	0.00	0.00	8.78	
75	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul	BANTUL	8.75	0.00	0.00	8.75	
76	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	7.66	0.75	0.00	8.41	
77	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	8.21	0.00	0.00	8.21	
78	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	8.09	0.00	0.00	8.09	
79	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul	BANTUL	6.87	1.00	0.00	7.87	
80	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	7.13	0.40	0.00	7.53	

81	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	1.26	6.25	0.00	7.51	
82	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	6.90	0.60	0.00	7.50	
83	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	7.04	0.40	0.00	7.44	
84	Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	7.18	0.00	0.00	7.18	
85	Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	6.28	0.80	0.00	7.08	
86	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	5.44	1.60	0.00	7.04	
87	Dinas Kesehatan Kab. Sleman	SLEMAN	6.32	0.70	0.00	7.02	
88	Bagian Umum Setda Kab. Bantul	BANTUL	6.16	0.60	0.00	6.76	
89	Dinas Perdagangan Kab. Bantul	BANTUL	6.47	0.20	0.00	6.67	
90	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	6.41	0.20	0.00	6.61	
91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Sleman	SLEMAN	3.59	3.00	0.00	6.59	
92	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	5.86	0.60	0.00	6.46	
93	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	5.29	1.15	0.00	6.44	
94	Bagian Humas dan Protokol SEKDA Kab. Sleman	SLEMAN	4.35	1.80	0.00	6.15	
95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	5.34	0.75	0.00	6.09	
96	RSUD WATES	KULON PROGO	4.82	1.20	0.00	6.02	
97	Dinas Sosial Kab. Sleman	SLEMAN	5.94	0.00	0.00	5.94	

98	Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian (KUKMP) Kab. Bantul	BANTUL	4.23	1.70	0.00	5.93	
99	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	5.85	0.00	0.00	5.85	
100	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Bantul	BANTUL	5.63	0.00	0.00	5.63	
101	Dinas Pariwisata Kab. Kulon Progo	KULON PROGO	4.00	1.60	0.00	5.60	
102	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	5.54	0.00	0.00	5.54	
103	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P2KBPM) Kab. Bantul	BANTUL	4.52	1.00	0.00	5.52	
104	Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	5.45	0.00	0.00	5.45	
105	Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	5.22	0.00	0.00	5.22	
106	Bagian Protokol Setda Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	5.04	0.00	0.00	5.04	
107	RSUD NYI AGENG SERANG	KULON PROGO	4.57	0.40	0.00	4.97	
108	Bappeda Kab. Bantul	BANTUL	3.90	0.60	0.00	4.50	
109	Kantor Kesatuan bangsa Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	4.39	0.00	0.00	4.39	
110	Bagian Umum Setda Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	4.22	0.00	0.00	4.22	
111	Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Bantul	BANTUL	4.18	0.00	0.00	4.18	
112	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul	BANTUL	3.68	0.00	0.00	3.68	
113	Inspektorat Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	3.68	0.00	0.00	3.68	
114	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul	BANTUL	3.34	0.00	0.00	3.34	
115	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman	SLEMAN	3.30	0.00	0.00	3.30	

**HASIL PEMERINGKATAN  
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK  
TAHUN 2017  
KATEGORI: BADAN PUBLIK KECAMATAN**

NO	Nama Badan Publik	Variabel			Total Nilai	Peringkat
		SAQ	Website	Visitasi		
		20%	50%	30%		
1	Kecamatan Ngemplak	9.50	35.75	28.50	73.75	Terbaik 1
2	Kecamatan Depok	11.84	30.80	28.50	71.14	Terbaik 2
3	Kecamatan Godean	8.91	17.25	28.80	54.96	Terbaik 3
4	Kecamatan Ngaglik	9.01	11.50	24.30	44.81	Terbaik 4
5	Kecamatan Kokap	7.43	15.10	12.90	35.43	Terbaik 5
6	Kecamatan Samigaluh	6.83	12.80	15.60	35.23	
7	Kecamatan Girimulyo	6.01	10.85	0.00	16.86	
8	Kecamatan Cangkringan	13.29	3.50	0.00	16.79	
9	Kecamatan Seyegan	12.86	1.20	0.00	14.06	
10	Kecamatan Pundong	4.27	9.75	0.00	14.02	
11	Kecamatan Kalasan	12.62	0.80	0.00	13.42	
12	Kecamatan Umbulharjo	13.11	0.00	0.00	13.11	
13	Kecamatan Sewon	4.86	7.85	0.00	12.71	
14	Kecamatan Nanggulan	3.50	7.85	0.00	11.35	
15	Kecamatan Pakualaman	11.32	0.00	0.00	11.32	



16	Kecamatan Pakem	8.19	2.60	0.00	10.79	
17	Kecamatan Mantrijeron	10.72	0.00	0.00	10.72	
18	Kecamatan Bantul	3.57	6.50	0.00	10.07	
19	Kecamatan Minggir	8.95	1.00	0.00	9.95	
20	Kecamatan Mergangsan	9.67	0.00	0.00	9.67	
21	Kecamatan Pandak	5.95	3.60	0.00	9.55	
22	Kecamatan Lendah	6.15	3.40	0.00	9.55	
23	Kecamatan Wates	8.53	0.90	0.00	9.43	
24	Kecamatan Ngampilan	9.39	0.00	0.00	9.39	
25	Kecamatan Kraton	9.31	0.00	0.00	9.31	
26	Kecamatan Srandakan	8.68	0.60	0.00	9.28	
27	Kecamatan Tempel	4.91	4.00	0.00	8.91	
28	Kecamatan Sanden	4.78	4.10	0.00	8.88	
29	Kecamatan Kotagede	8.67	0.00	0.00	8.67	
30	Kecamatan Gondomanan	8.54	0.00	0.00	8.54	
31	Kecamatan Kasihan	4.09	4.30	0.00	8.39	
32	Kecamatan Bambanglipuro	5.41	2.90	0.00	8.31	
33	Kecamatan Jetis	6.60	1.60	0.00	8.20	

34	Kecamatan Wirobrajan	7.76	0.00	0.00	7.76	
35	Kecamatan Gedongtengen	7.61	0.00	0.00	7.61	
36	Kecamatan Sedayu	5.89	1.60	0.00	7.49	
37	Kecamatan Turi	3.79	3.10	0.00	6.89	
38	Kecamatan Prambanan	6.64	0.20	0.00	6.84	
39	Kecamatan Moyudan	6.75	0.00	0.00	6.75	
40	Kecamatan Danurejan	6.70	0.00	0.00	6.70	
41	Kecamatan Jetis	6.70	0.00	0.00	6.70	
42	Kecamatan Berbah	6.14	0.40	0.00	6.54	
43	Kecamatan Piyungan	4.65	1.60	0.00	6.25	
44	Kecamatan Panjatan	5.10	0.90	0.00	6.00	
45	Kecamatan Mlati	5.36	0.40	0.00	5.76	
46	Kecamatan Sleman	5.29	0.40	0.00	5.69	
47	Kecamatan Gondokusuman	5.59	0.00	0.00	5.59	
48	Kecamatan Gamping	5.28	0.00	0.00	5.28	
49	Kecamatan Tegalrejo	5.23	0.00	0.00	5.23	
50	Kecamatan Kretek	3.83	0.60	0.00	4.43	

51	Kecamatan Pajangan	4.11	0.00	0.00	4.11	
52	Kecamatan Imogiri	3.43	0.60	0.00	4.03	
53	Kecamatan Banguntapan	2.92	1.10	0.00	4.02	
54	Kecamatan Tanjungsari	2.05	1.55	0.00	3.60	

Keterangan :

\*SAQ : *Self Assesment Questionnaire (Penilaian Mandiri)*

\*Website: *Verifikasi Website*

\*(-) : *Website tidak dinilai dan tidak di visitasi karena tidak memenuhi kriteria dan peringkat dalam kategori yang sudah ditetapkan Tim Monev pada tahap pertama (SAQ).*

**HASIL PEMERINGKATAN  
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK  
TAHUN 2017  
KATEGORI: BADAN PUBLIK VERTIKAL**

NO	Nama Badan Publik	Variabel			Total Nilai	Peringkat
		SAQ	Website	Visitasi		
		20%	50%	30%		
1	BPKP Provinsi DIY	8.17	48.20	18.90	75.27	Terbaik 1
2	KPU DIY	15.30	15.80	25.50	56.60	Terbaik 2
3	BPK Perwakilan Prov DIY	18.15	7.00	26.40	51.55	Terbaik 3
4	BPS Gunungkidul	12.32	17.95	20.10	50.37	
5	KPU Kulon Progo	13.15	8.20	25.50	46.85	
6	Kanwil Kemenkumham DIY	11.25	17.50	12.60	41.35	
7	KPU Kab. Sleman	9.95	8.75	0.00	18.70	
8	BPS Kota Yogyakarta	6.92	10.80	0.00	17.72	
9	POLDA DIY	7.00	10.55	0.00	17.55	
10	KPU Bantul	6.39	9.30	0.00	15.69	
11	BPN Bantul	5.25	8.80	0.00	14.05	

12	Polres Gunungkidul	11.52	1.20	0.00	12.72	
13	Polres Kulon Progo	12.21	0.00	0.00	12.21	
14	KPU Gunungkidul	6.45	4.20	0.00	10.65	
15	BPN Kulon Progo	3.50	6.50	0.00	10.00	
16	Kemenag Gunungkidul	8.42	0.00	0.00	8.42	
17	Kemenag Bantul	6.09	2.00	0.00	8.09	
18	Polres Bantul	7.14	0.00	0.00	7.14	
19	BPN Sleman	6.12	1.00	0.00	7.12	
20	KPP Pratama Sleman	6.33	0.00	0.00	6.33	
21	Kemenag Sleman	6.09	0.00	0.00	6.09	
22	KPU Kota Yogyakarta	5.26	0.00	0.00	5.26	

Keterangan :

\*SAQ : Self Assesment Questionnaire (Penilaian Mandiri)

\*Website: Verifikasi Website

\*(-) : Website tidak dinilai dan tidak di visitasi karena tidak memenuhi kriteria dan peringkat dalam kategori yang sudah ditetapkan Tim Monev pada tahap pertama (SAQ).

**HASIL PEMERINGKATAN  
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK  
TAHUN 2017  
KATEGORI: BADAN PUBLIK YUDIKATIF**

NO	Nama Badan Publik	Variabel			Total Nilai	Peringkat
		SAQ	Website	Visitasi		
		20%	50%	30%		
1	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	9.05	30.50	30.00	69.55	Terbaik 1
2	Pengadilan Agama Bantul	8.37	29.30	23.70	61.37	Terbaik 2
3	Pengadilan Agama Wates	9.39	33.50	15.00	57.89	Terbaik 3
4	Kejaksaan Tinggi DIY	6.87	16.30	25.50	48.67	

5	Kejaksaan Negeri Kulon Progo	9.80	9.50	21.60	40.90	
6	Pengadilan Negeri Bantul	11.52	6.35	18.90	36.77	
7	Kejaksaan Negeri Sleman	7.44	10.05	0.00	17.49	
8	Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	14.47	0.00	0.00	14.47	
9	Pengadilan Agama Wonosari	5.86	0.00	0.00	5.86	
10	Kejaksaan Negeri Bantul	3.93	0.60	0.00	4.53	
11	Kejaksaan Negeri Gunungkidul	3.35	0.00	0.00	3.35	

Keterangan :

\*SAQ : Self Assesment Questionnaire (Penilaian Mandiri)

\*Website: Verifikasi Website

\*(-) : Website tidak dinilai dan tidak di visitasi karena tidak memenuhi kriteria dan peringkat dalam kategori yang sudah ditetapkan Tim Monev pada tahap pertama (SAQ).

**HASIL PEMERINGKATAN  
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK  
TAHUN 2017  
KATEGORI: BADAN PUBLIK BUMD**

NO	Nama Badan Publik	Variabel			Total Nilai	Peringkat
		SAQ	Website	Visitasi		
		20%	50%	30%		
1	PD BPR Bank Sleman	6.80	12.00	27.30	46.10	Terbaik 1
2	PD Bank Pasar Kab. Kulon Progo	4.87	14.50	22.50	41.87	Terbaik 2
3	PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta	5.36	3.50	16.50	25.36	Terbaik 3
4	PT. Anindya Mitra Internasional (AMI) DIY	5.16	9.00	5.10	19.26	
5	PD Aneka Usaha Kab. Kulonprogo	8.38	3.50	1.50	13.38	
6	PD Jogjatama Vishesha	4.11	3.50	5.70	13.31	

7	PDAM Kab. Bantul	5.98	0.00	0.00	5.98	
8	PDAM Kab. Kulon Progo	5.22	0.00	0.00	5.22	

Keterangan :

\*SAQ : *Self Assesment Questionnaire (Penilaian Mandiri)*

\*Website: *Verifikasi Website*

\*(-) : *Website tidak dinilai dan tidak di visitasi karena tidak memenuhi kriteria dan peringkat dalam kategori yang sudah ditetapkan Tim Monev pada tahap pertama (SAQ).*

## 6. Kondisi Umum dan Pembelajaran

Dari serangkaian proses monitoring dan evaluasi Tim Monev mendapatkan beberapa catatan yang menarik, antara lain:

### a. Kondisi Umum:

Badan Publik masih belum banyak yang menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik khususnya Pasal 11,12 dan 13. Badan Publik masih sedikit yang menyediakan Informasi Berkala yang berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan serta tugas dan fungsinya. Dalam hal informasi tentang program dan kegiatan, masih sedikit yang menyediakan jadwal, target dan capaian kegiatan. Bahkan Badan Publik yang dimonitoring dan evaluasi, masih sangat sedikit yang membuat ringkasan akses informasi publik.

### b. Catatan Khusus

Dari berbagai hal yang ditemui selama monitoring dan evaluasi, terdapat catatan khusus yang perlu mendapat perhatian dari Badan Publik antara lain:

1. Badan Publik belum membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik dan menyampaikan salinannya ke Komisi Informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf j, Perki 1 Tahun 2010;
2. Bagan Struktur Organisasi yang disediakan PPID Utama berupa bagan struktur organisasi PPID, padahal mestinya PPID utama sebagai pengelola informasi publik Pemerintah Daerah, yang disediakan berupa Struktur Organisasi di lingkup Pemerintah Daerah;
3. PPID Utama yang sudah mempunyai website, harus linked/terhubung dan dengan portal Pemerintah Daerah. Bahkan untuk efisiensi, website PPID Utama juga hendaknya menjadi sub domain Portal Pemerintah Daerah, sehingga tidak menambah biaya *hosting*.

4. Masih sangat sedikit Badan Publik yang menyediakan informasi serta merta, yang berupa informasi kedaruratan di lokasi Badan Publik, seperti petunjuk arah evakuasi, titik kumpul dsb.

**c. Nilai Pembelajaran:**

Selama proses monitoring dan evaluasi, khususnya saat dilakukan visitasi, terdapat pembelajaran yang dapat diambil nilainya untuk ditularkan ke Badan Publik lainnya antara lain:

1. Kreativitas PPID melakukan rekap setiap akhir bulan secara rutin atas buku register layanan informasi publik dan ditandatangani PPID. Bahkan Pimpinan Badan Publik juga secara rutin melakukan supervisi terhadap pengelolaan dokumen yang dilakukan PPID;
2. Badan Publik bukan hanya menyediakan peralatan kedaruratan tetapi juga membuat pedoman penggunaan alat tersebut. Misalnya cara penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang dilengkapi dengan cara penggunaannya;
3. Badan Publik perlu memberikan petunjuk arah bagi masyarakat yang akan mengakses layanan Badan Publik, sehingga memudahkan masyarakat.

## 7. Penutup

Selamat kepada pemenang. Semoga tidak cepat berpuas diri, sehingga dapat terus semangat dalam meningkatkan budaya keterbukaan informasi publik di lembaga masing-masing. Dan bagi yang belum menjadi pemenang, semoga tidak berkecil hati, harus lebih termotivasi lagi dengan segera mengevaluasi, mengoreksi, dan memperbaiki praktek keterbukaan informasi publik yang berjalan selama ini di lembaga masing-masing. Kami haturkan terima kasih juga kepada Kepala Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Yogyakarta beserta para Penelitinya, Para Pimpinan Badan Publik di DIY, serta semua pihak yang telah mendukung monitoring dan evaluasi ini. Kami berharap monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian dari pembelajaran kita semua untuk menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.

Yogyakarta, 25 oktober 2017

Ketua KID DIY



(Hazwan Iskandar Jaya, SP)